

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, 2017, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana, Jakarta.
- Aminuddin Ilmar, 2021, *Buku Ajar Hukum Tata Pemerintahan (Bestuurecht, Government law)*, UPT Unhas Press, Makassar.
- Andri Mosepa, Et.al, 2021, *PTUN Aktual: Sengkarut Upaya Administratif*, Bandung, Litera.
- Azmi Fendri, 2016, *Pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumberdaya mineral dan batu bara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo
- Badan Pengkajian MPR RI, 2017, *Check and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta.
- Enrico Simanjuntak, 2017, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hotma B. Sibuea, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan kebijakan, & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta, Topoffset.
- Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandungm PT. Alumni.
- Irvan Mawardi, 2016, *Paradigma baru PTUN Respon Peradilan Administrasi Terhadap Demokratisasi*, Yogyakarta, Thafa Media.
- Maftuh Effendi, 2017, *Dinamika Yurisdiksi Peradilan Administrasi*, Bandar Lampung, Pusaka Media.
- Miriam Budiardjo, 1997, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Jakarta.

- Muhammad Noor Halim P K dan Muhammad Agiduna B, 2020, *Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik*, Kencana, Jakarta.
- Nurul Qamar, 2010, *Negara Hukum atau Negara Undang-Undang*, Makassar, Pustaka Refleksi.
- Nur Basuki Winarno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta, Laksbang Mediatama.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu.
- Philipus M. Hadjon, *Et.al*, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup.
- R. Soeroso, 2011 *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Ridwan H.R, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- , 2019, *Urgensi Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press.
- S.F. Marbun, 2011, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta, FH.UII Press.
- , 2003, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, FH.UII Press.
- Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Sjahan Basah, 1985, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Chaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Teguh Satya Bhakti, *Et.al*, 2014, *Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer*, Genta, Yogyakarta.

Yodi Martono Wahyunadi, 2018, *Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Bandar Lampung, Aura.

Yodi Martono Wahyunadi. Et.al, 2022, *PTUN Untuk Keadaban Publik*, Litera, Yogyakarta.

Zairin Harahap, 2015, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Depok, Rajagrafindo Persada.

Jurnal

Andi, *Bias Kewenangan Fiktif Positif Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Ranah Perizinan Pasca Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja*, Vol. 6 No.2, *Journal of Law and Policy Transformation*, 2021.

Budiamin Roddin, *Keputusan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*, *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 1 No.1, Universitas Tajungpura, 2017.

Desy Wulandari, *Pengujian Keputusan Fiktif Positif di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Vol. 5 No. 1, *Lex Renaissance*, 2020.

Dian Agung Wicaksono, dkk, *Qou Vadis Pengaturan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penerimaan Permohonan Fiktif Positif Pasca Penataan Regulasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja*, Vol. 10, No. 2, *Rechtsvinding*, 2021.

Erico Simanjuntak, *Prospek Prinsip Fiktif Positif Dalam Menunjang Kemudahan Berusaha di Indonesia*, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 7 No. 2, Badan Pembinaan Hukum Nasional.

I Gusti Ngurah Wairocana, dkk, *Kendala dan Cara Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Pasca UU Administrasi Pemerintahan: Suatu Pendekatan Atas Penanganan Perkara Fiktif Positif*, Vol. 50, No. 3, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2020.

Mailinda Eka Yuniza dan Melodia Puji Inggarwati, *Peluang dan Tantangan Penerapan Keputusan Fiktif Positif Setelah Undang-Undang Cipta Kerja Diundangkan*. Vol. 13, No. 2, *Jurnal de Jure*, 2021.

Muhammad Adiguna Bimasakti *Onrechtmatig Overheidsdaad Oleh Pemerintah Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, *Jurnal Hukum Peratun*, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2018 : 265 - 286

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Mahkamah Agung 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penanganan Pendaftaran Perkara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja